

PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TEKS PEMBERITAAN SYARIAT ISLAM

Putri Maulina*

Universitas Teuku Umar, Meulaboh | Putrimaulina.lecturer@gmail.com

ABSTRAK

Media has a big power to create public opinion about the position of gender. The asymmetry relation between man and woman always showed in the news coverage of media – as particular in the Sharia news. Including to the Sharia News, woman became the figure which most frequently reported by the media. While the Sharia issues is abused by the media to naturalize the discrimination of woman. Many of Sharia cases in the reality was constructed by the media in such a way, which carried of dominant ideology that oppressed the woman. At the last, the woman was muted by the media in Sharia news coverage.

Keywords: Woman, Sharia, Media.

مستخلص

الوسائل الإعلامية تلعب دورا كبيرا في تشكيل عقلية المجتمع على كيفية وضع الجنسين. العلاقة الفجوة بين المرأة والرجل في وسائل الإعلام الجماهيرية هناك فرق كبير هي واقع غالبا ما ينظر في شكل أخبار. لا يوجد استثناء في إبلاغ الأخبار خاصة عن موضوع الشريعة الإسلامية والنساء تكون على الشكل الأكثر شيوعا للاهتمام في وسائل الإعلام من إخبارهن. قضايا الشريعة الإسلامية تكون وسائل التي تساء في استخدامها من قبل وسائل الإعلام لتصفية أشكال التمييز ضد المرأة. تم العثور على حالات مختلفة من الشريعة الإسلامية في مجال، شيدت من قبل وسائل الإعلام في مثل هذه الطريقة من خلال جلب الأيديولوجيات السائدة التي تضر النساء. حتى في نهاية المطاف، بإسكات النساء في التغطية الإعلامية من الإخبار فيها تحقيق القانون الإسلامي.

الكلمة الأساسية : النساء ، الشريعة الإسلامية، وسائل الإعلام.

Pendahuluan

Sejak Syariat Islam secara sah diberlakukan di Aceh pada Maret 2001, isu-isu perempuan berkaitan dengan implementasi Syariat Islam menjadi isu yang menarik untuk diberitakan oleh media massa. Beberapa tema pemberitaan tentang Syariat Islam yang menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan,

yaitu berkisar di seputar kasus tentang pelanggaran terhadap Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum); tema tentang pemberlakuan Perda Syariat Islam terhadap perempuan; serta kasus tindakan asusila dan kriminalitas.

Pada 25 Mei 2010 Bupati Aceh Barat, Ramli MS, secara resmi menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara berbusana muslim oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Namun Perbup tersebut lantas menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Media-media lokal, nasional, dan internasional menjadi sarana penyebaran wacana pro dan kontra dari pihak-pihak yang menanggapi peraturan Bupati Aceh Barat tersebut. Dengan mengatasnamakan Hak Asasi Manusia, peraturan berbusana Islami tersebut ditentang karena dianggap terlalu memojokkan pihak perempuan.

Pada dasarnya, Peraturan Bupati Aceh Barat terkait dengan kewajiban berbusana muslim tidak hanya ditujukan kepada kalangan perempuan saja. Dalam pasal 4 Perbup Aceh Barat No. 5 tahun 2010 dijelaskan bahwa baik pihak laki-laki dan perempuan yang berada di Aceh Barat diharuskan untuk menggunakan pakaian Islami sesuai dengan standar ketetapan yang diberlakukan, kondisi waktu dan tempat.

Munculnya perda-perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariah ini direspon secara beragam. Terdapat 3 kategori respon masyarakat dalam menyikapi lahirnya perda bernuansa syariah ini: pertama, mereka yang menolak implementasi perda syariah dengan berbagai argumentasi. Kedua, mereka yang menekankan perda bernuansa syariah sebagai keniscayaan. Salah satu alasannya adalah karena perempuan dinilai sebagai penegak moral, maka sasaran utama berbagai perda di

atas adalah perempuan. Ketiga adalah mereka yang tidak memberikan respon¹.

Dalam hal ini, media berperan besar dalam mengkonstruksi realita tentang peraturan bupati tersebut. Bagaimana konstruksi realita yang dibangun oleh media tentang kebijakan Bupati Aceh Barat mengenai pemberlakuan syariat Islam akan dimaknai oleh khalayak yang menikmati pemberitaannya. Begitu pula representasi kedudukan perempuan Aceh, media memiliki kuasa untuk membangun kebenaran dominan tentang posisi perempuan dengan mengatasnamakan peraturan syariat Islam tersebut. Isu perempuan selalu saja menjadi isu yang menarik untuk dibahas di media massa, begitu pula jika dikaitkan dengan syariat Islam.

Bias jender di dalam pemberitaan bertema Syariat Islam ini tidak terlepas dari bagaimana peran redaksional media dalam menyeleksi dan menyiarkan pemberitaan tersebut. Dikotomi dan pengaturan hirarki jender antara laki-laki dan perempuan di institusi media massa sangat memungkinkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan seringkali diposisikan sebagai sesuatu yang inferior dan tidak menguntungkan, sehingga apa yang biasa dilihat oleh khalayak di media massa sebenarnya merupakan suatu hubungan yang tidak simetris dengan adanya dominasi laki-laki sebagai pihak yang superior. Pengaruh budaya patriarkis dari masyarakat membuat perempuan di media massa cenderung diabaikan dan sering kali disudutkan dengan stigmatisasi

¹Pudjo Suharso, *Pro Kontra Implementasi Perda Syariah*, Jurnal. Al-Mawarid. Edisi XVI, 2006, h. 233.

negatif. Perempuan diposisikan sebagai korban, pihak yang lemah, dan tidak berdaya dalam pemberitaan media massa².

Pemberitaan tentang peraturan berbusana Islami yang disiarkan media kepada khalayak tentu saja berkaitan dengan bagaimana proses penyeleksian isu dan aktifitas jurnalistik yang terjadi di bagian redaksional institusi media. Ketidakadilan terhadap jender dapat terjadi dalam berbagai jenis pemberitaan di media massa, seperti dalam pemberitaan penerapan Syariat Islam di Aceh. Isi pemberitaan mengenai peraturan Syariat Islam merupakan salah satu modus yang memperlihatkan bentuk-bentuk ketidakadilan jender yang dilakukan oleh media. Maka, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan di dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimanakah perempuan dikonstruksikan dalam pemberitaan Qanun Berbusana Islami di Aceh Barat pada portal media online *acehkita.com*, *thejakartaglobe.com* dan *bbcnews.com*?
2. Dominasi ideologi jender seperti apakah yang muncul di dalam pemberitaan tentang Qanun Berbusana Islami di Aceh Barat?
3. Bagaimanakah perempuan dibungkam oleh ideologi jender dominan dalam pemberitaan tentang Qanun Berbusana Islami di Aceh Barat?

²Charlotte Krollokke & Anne Scott Sorensen, *Jender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance* (California: Sage Publications, 2006), h. 78-79.

Kajian Teoritis Dan Metodologi

Menurut Wulandari melalui pemberitaan mengenai berbagai isu perempuan dan jender, media massa dapat membangun cara pandang pembacanya untuk semakin berperspektif perempuan dan semakin sensitif jender atau malah sebaliknya menjadi bias jender³. Realitas yang disiarkan oleh media tentang isu-isu syariat Islam, jika dipandang dalam perspektif konstruksionis adalah bersifat subjektif yang hadir karena subjektifitas wartawan, tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu sehingga realitas tersebut akan dipahami berbeda-beda oleh wartawan⁴.

Dari sudut pandang konstruksionis media massa dianggap memiliki pandangan, bias, dan juga kecenderungan pemihakannya. Seperti yang dijelaskan oleh West dan Turner (2008: 187) bahwa dalam pandangan konstruksionis, yang difokuskan adalah bagaimana suatu realitas yang berkembang dalam masyarakat dibentuk oleh media. Isi media merupakan hasil praktisi media mengkonstruksi berbagai realitas yang dipilihnya berdasarkan ideologi dan kognisi sosial wartawan. Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan menjadi sebuah berita bermakna yang disajikan kepada publik⁵.

³Dyah Wulandari, *Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Jender*. Jurnal Interaksi. Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1, 2012, h.29.

⁴Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LkiS, 2002), h.22.

⁵Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap berita-berita Politik* (Jakarta: Granit 2004), h. 11.

Sudut pandang penulisan kajian ini didasari pada paradigma kritikal-konstruktivisme, yang merupakan perpaduan dari dua teori dalam sosiologi, yaitu: Teori Konflik yang berfokus pada perjuangan antara kaum borjouis dan proletar, yang memperkenalkan bentuk eksploitasi.

Kemudian Teori Interaksionisme Simbolik yang menganggap masyarakat sebagai pelaku komunikasi dan bukan komunitas yang pasif, melainkan penuh interaksi dinamis yang banyak menawarkan simbol-simbol⁶.

Sedangkan kajian feminis yang penulis anggap cocok untuk menjelaskan permasalahan ketidakadilan perempuan di institusi media massa adalah feminisme sosialis. Tong menjelaskan bahwa pemikiran feminisme sosialis ini mencoba memberikan suatu gambaran bagaimana cara-cara kapitalisme berinteraksi dengan sistem patriarki yang memposisikan perempuan lebih buruk daripada laki-laki. Pemikiran ini mengklaim bahwa kapitalisme tidak akan dapat dihancurkan kecuali patriarki juga dihancurkan, sehingga perempuan akan terbebas dari kekuatan opresi jika terbebas dari dua hal tersebut⁷.

Menurut Nugroho feminisme sosialis menjadi sebuah gerakan untuk membebaskan para wanita melalui perubahan struktur patriarkat, agar kesetaraan gender dapat diwujudkan⁸.

⁶Dyah Wulandari, Op.cit, h. 30.

⁷Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 175.

⁸Riant Nugroho, *Jender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69-70.

Sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horizontal. Gerakan feminisme sosialis ini mengadopsi Teori Marxisme, yaitu tentang penyadaran pada kelompok tertindas, agar para wanita sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan.

Feminisme sosialis tidak hanya memfokuskan pada jender untuk menjelaskan posisi wanita di masyarakat, tetapi juga mencoba untuk menggabungkan analisis kelas dan kondisi ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di dalam industri media massa, Sunarto menjelaskan aplikasi pemikiran feminisme sosialis dalam media massa meyakini bahwa industri media menjadi instrumen ideologi dengan menampilkan masyarakat patriarkis dan kapitalis sebagai tatanan sosial yang natural atau disebut olehnya sebagai “seekor binatang buas berkepala dua”⁹. Media massa di sini menampilkan ideologi jender dominan, yaitu kapitalisme dan patriarkisme yang dianggap sebagai suatu sistem paling menarik, sehingga ideologi jender dominan tersebut diterjemahkan sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima secara umum. Maka, jika ingin benar-benar membebaskan wanita dari penindasan, yang harus dilakukan adalah dengan menebas kedua kepala binatang buas tersebut.

Lebih lanjut, permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan dalam konteks kajian ilmu komunikasi dapat dilihat melalui *Muted Group Theory*. Teori ini dibangun berkisar konsekuensi negatif dari pendapat Marxis,

⁹Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 79.

menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang marginal di masyarakat dan dengan itu menjadi penghambat gerak mereka¹⁰.

Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai peraturan berbusana Islami di Kabupaten Aceh Barat, yang di kaji pada tiga media online edisi tanggal 28-29 Oktober 2010 yaitu *acehkita.com* merupakan media online lokal Aceh, *thejakartaglobe.com* merupakan media online nasional, dan *bbcnews.com* yang merupakan media online internasional. Penulisan kajian ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis *framing*. Penggunaan analisis *framing* ini adalah berusaha untuk membongkar bagaimana sensitifitas jurnalis terhadap posisi jender yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi dibalik pemberitaan pada media-media online tersebut¹¹.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan perangkat *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Ada tiga elemen analisis yang digunakan dalam model ini: **pertama** adalah sintaksis (cara wartawan menyusun fakta) yang mengamati skema berita; **kedua** adalah skrip (cara wartawan mengisahkan fakta) yang mengamati alur dan kelengkapan isi berita; **ketiga** adalah tematik (cara wartawan menulis fakta) yang mengamati dari sisi detail, maksud kalimat, nominalisasi antar kalimat, koherensi, bentuk kalimat, serta bentuk kata ganti di dalam berita; dan **keempat** adalah retorisi

(cara wartawan menekankan fakta) yang dilihat dari penggunaan leksikon, grafis, metafor, dan pengandaian dalam berita.

PEMBAHASAN

Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Qanun Berbusana Muslim di acehkita.Com, thejakartaglobe.com dan bbcnews.com

Menurut Byerly dan Ross, cara perempuan direpresentasikan media di dalam suatu pemberitaan memberikan pesan penting untuk khalayak terhadap kedudukan perempuan, peran perempuan, dan kehidupan perempuan. Media berperan penting dalam menyeleksi dan menangkap isu-isu Syariat Islam di dalam masyarakat yang berfokus pada ketidakadilan dan diskriminasi jender, karena apapun yang disiarkan oleh media dapat membentuk persepsi masyarakat. Persoalan perempuan di media massa biasanya menyangkut tiga hal, yaitu representasi negatif terhadap perempuan, keterlibatan perempuan yang belum berimbang dengan laki-laki di dalam struktur institusi media, dan isi pemberitaan yang tidak sensitif dengan persoalan perempuan.

Media dalam hal ini memiliki peranan penting untuk menangkap permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, khususnya mengenai ketidakadilan dan diskriminasi terhadap jender. Informasi yang disampaikan oleh media dapat membentuk persepsi yang berkembang dalam masyarakat, seperti mengenai aturan larangan bercelana ketat oleh Bupati Aceh Barat terhadap perempuan di wilayah tersebut. Orientasi *Acehkita*, *Thejakartaglobe*, dan *Bbcnews*, yang menonjolkan sosok perempuan

¹⁰Charlotte Krollokke & Anne Scott Sorensen, *op.cit*, h. 30-31.

¹¹Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 56.

dalam pemberitaan isu syariat Islam tersebut tidak dapat ditutupi. Faktor eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi mempengaruhi jurnalis atau pihak media dalam mengkonstruksi isu tersebut. Ketika proses awal peliputan, jurnalis media yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki menggunakan persepsi maskulinitasnya untuk memaknai peristiwa tersebut sebagai tahap internalisasi.

Isu mengenai aturan berbusana muslim di Aceh Barat yang dimaknai oleh jurnalis kemudian diobjektivasi dan dituliskan menjadi sebuah bentuk pemberitaan. Bentuk pemberitaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari jurnalis dan perusahaan media tempat dia bekerja. Kebijakan redaksional media-media mempertimbangkan sisi kepentingan ekonomi perusahaan, membawa isu syariat Islam tersebut ke dalam kepentingan tertentu. Konstruksi sosial yang dibentuk oleh media terhadap posisi dan peran perempuan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan baik secara positif ataupun negatif¹².

Berikut kutipan pemberitaan tentang isu aturan berbusana Islami yang diberitakan oleh media *Acehkita*:

*“Kebijakan Bupati Aceh Barat Ramli tentang **pelarangan memakai busana ketat bagi perempuan**, masih menuai pro kontra di masyarakat.”*

Konstruksi yang dilakukan oleh media ini mengambil *angle* pemberitaan dengan lebih menonjolkan pada sisi pro kontra larangan berpakaian ketat bagi perempuan di Aceh Barat. *Acehkita* membangun suatu realita, bahwa aturan yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat ini dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial di masyarakat Aceh itu sendiri, khususnya mengenai larangan berbusana ketat bagi perempuan. Padahal, aturan tersebut sebenarnya tidak hanya mengatur tentang tata cara berbusana Islami bagi kalangan perempuan, namun juga bagi para lelaki. *Acehkita* dalam pemberitaan ini memposisikan realitas larangan berbusana ketat terhadap perempuan sebagai isu yang lebih menarik untuk ditonjolkan. Ada suatu realitas yang dibangun oleh media ini bahwa perempuan di Aceh Barat dituntut oleh suatu kebijakan atau kewajiban syariat yang dianggap menuai perdebatan.

Acehkita sebagai salah satu media online Aceh yang berada di daerah dengan otonomi syariat Islam tersebut, tentu saja memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberitakan suatu kasus syariat Islam. Di satu sisi *Acehkita* sebagai media di Aceh, secara fungsional harus dapat menjadi sarana untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan aturan syariat Islam. Namun, di sisi lainnya *Acehkita* juga memiliki perspektifnya tersendiri dalam mengkonstruksi realitas syariat Islam yang ditemukannya. Dalam hal ini, *Acehkita* memberikan penggambaran seakan-akan ada suatu kesalahan pada aturan syariat Islam yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat tersebut. Namun menggambarkan hal tersebut sebagai suatu yang “pro” dan

¹²Susilastuti Dwi Nugrahajati, *Potrait of Woman on Mass Media* (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), h. 534-535.

“kontra” sehingga masih memberikan kesan bahwa media ini tidak secara langsung cenderung memojokkan pemerintah setempat atas aturan syariat Islam.

Namun jika dikaji lebih lanjut, dari sisi alur pemberitaan, *Acehkita* cenderung menekankan pada sisi kontra terhadap aturan larang bercelana ketat pada perempuan. Tidak diceritakan tanggapan pihak laki-laki Aceh Barat yang juga menjadi bagian dari penerapan aturan berbusana muslim. Sehingga sorotan terhadap pihak laki-laki menjadi kurang. Media ini justru menekankan sisi diskriminatif aturan syariat Islam terhadap perempuan dan meniadakan alasan-alasan dari pihak pemerintah yang terlibat. Pertimbangan media ini menekankan perempuan sebagai sosok utama yang menarik untuk diberitakan dalam isu syariat Islam tersebut, bisa saja karena tuntutan sosial atau faktor ekonomi karena isu ini dianggap lebih kontroversial dan menarik minat baca khalayak ramai.

Sedangkan di dalam pemberitaan *Thejakartaglobe*, beberapa contoh kutipan yang dapat menunjukkan kecenderungan media tersebut terhadap “kebiasan” jender adalah:

*“The law does not **prohibit women** from wearing pants. What’s prohibited is wearing tight-fitting pants or jeans. If for instance, **they have to wear pants, they have to cover their ankles and wear a loose skirt over it.**”* (Aturan tidak melarang perempuan untuk mengenakan celana. Jika mereka diharuskan memakai celana, maka mereka

harus menutup mata kaki dan memakai celana di atasnya)

*“One such method, Ramli said, **would be to encourage government employees to refuse to serve Muslims wearing un-islamic clothing.**”* (salah satu pendekatannya, Ramli berkata, akan mendorong pegawai pemerintahan untuk tidak melayani kalangan muslim yang memakai pakaian tidak Islami).

Dari penekanan dan gaya bahasa yang digunakan oleh wartawan media tersebut, dapat dilihat bahwa juga terdapat kecenderungan yang menonjolkan keberadaan perempuan sebagai sosok utama yang diekspos media. Pemberitaan di media ini memberikan kesan bahwa hanya perempuan di Aceh Barat-lah yang benar-benar mendapat “kekangan” aturan syariat. Kewajiban untuk menjalankan aturan tersebut seolah-olah dilimpahkan kepada kaum perempuan, sehingga sosok laki-laki yang sebenarnya juga terlibat dalam kewajiban menjalankan aturan syariat menjadi hilang. Perempuan, dalam hal ini digambarkan seperti pihak yang dibebankan sebagai patokan pelaksana hukum syariat yang diberlakukan.

Tanggapan para laki-laki atau muslim di Aceh Barat tentang penerapan aturan berbusana muslim tidak mendapatkan sorotan. *Thejakartaglobe* di sini juga lebih menekankan pada realitas bahwa ada ketegasan Bupati Aceh Barat untuk melarang perempuan memakai pakaian ketat dan melakukan pelanggaran syariat, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya tanggapan-tanggapan

negatif oleh pihak perempuan yang menentang aturan bupati tersebut. *Thejakartaglobe* sebagai media online nasional membungkus realitas tersebut dengan memberikan gambaran bahwa Bupati Aceh Barat sebagai pihak penguasa, memberikan tekanan kepada pihak perempuan Aceh Barat untuk menjalankan aturan syariat. Sehingga tanggapan-tanggapan negatif yang kemudian dimunculkan oleh *thejakartaglobe* justru memposisikan perempuan di Aceh Barat sebagai sosok yang “tertindas” oleh aturan tersebut. Dari konstruksi tersebut secara nasional perempuan di Aceh bisa saja diposisikan dan dilabelkan sebagai sosok yang kehilangan hak-hak pribadinya dalam berbusana, sedangkan Aceh digambarkan sebagai wilayah yang tidak memiliki toleransi terhadap perempuan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Krolokke dan Sorensen (2006), bahwa media merepresentasikan suatu praktik hegemoni, yang mana perempuan diposisikan sebagai pihak yang berada di bawah tekanan dan selalu dilabelkan sebagai “korban” yang tertindas.

...Gendered media representation serve illustrate hegemonics practices. And Women in the media are underrepresented, they are stereotypically portrayed (as a victims and so on). (Representasi media bias gender menggambarkan ilustrasi praktik-praktik hegemoni. Perempuan di media tertindas, mereka distereotipisasikan (sebagai

seorang korban dan sebagainya)”¹³.

Pada pemberitaan di edisi lainnya, *thejakartaglobe* kembali memunculkan pernyataan dari Bupati Aceh Barat :

*“Perempuan yang menolak untuk menggunakan pakaian Islami, itu artinya mereka minta untuk diperkosa,”*¹⁴.

Kutipan pernyataan Bupati Aceh Barat yang dilampirkan *thejakartaglobe* tersebut, secara jelas menggambarkan bahwa seakan-akan sikap perempuan-lah yang menjadi pemicu suatu tindakan asusila terjadi atas diri mereka. Terdapat penglabelan pada perempuan, bahwa perempuan adalah sumber dari terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan alasan pakaian yang tidak pantas. Kutipan *thejakartaglobe* tersebut justru membangun persepsi bagi para pembaca bahwa sosok perempuan di Aceh yang tidak memakai pakaian Islami adalah sosok dengan stigmatisasi negatif sebagai pihak “pembangkang” dan layak “dilecehkan”. Sedangkan dalam pemberitaan *bbcnews*, terdapat suatu kutipan:

“Muslim women in the Indonesian district of West Aceh are to be banned from wearing tight trousers or jeans.” (Perempuan muslim Indonesia di

¹³Charlotte Krolokke & Anne Scott Sorensen, *Jender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance* (California: Sage Publications, 2006), h. 79.

¹⁴*thejakartaglobe.com*, edisi 21 Agustus 2010.

Kabupaten Aceh Barat dilarang memakai celana ketat atau jeans).

Menariknya dalam pemberitaan di *bbcnews* ini, dari judul hingga isi berita media ini secara lebih tegas mempermasalahkan aturan larangan bercelana ketat bagi perempuan di Aceh Barat sebagai aturan yang dianggap tidak wajar. *Bbcnews* adalah media internasional sehingga sudut pandang yang digunakan dalam memberitakan hal tersebut adalah berdasarkan sudut pandang barat tentang penegakan HAM dan kurang pertimbangan pada esensial ajaran syariat Islamnya.

Pilihan kata “dilarang” dan dengan ditambahkan foto perempuan Aceh yang sedang berlari panik dengan memakai celana pada pemberitaan *bbcnews* menunjukkan kecenderungan media tersebut menolak aturan larangan bercelana di Aceh Barat, dengan memposisikan perempuan sebagai “korban” dari keketatan aturan syariat tersebut. Meskipun pemberitaan ditulis dengan sederhana, namun inti pesannya adalah langsung dengan tegas memberikan penggambaran bahwa Aceh membuat aturan ketat dan diskriminatif terhadap perempuan. *bbcnews* tersebut mengabaikan aspek kultural dan pandangan dari pihak yang setuju terhadap penerapan qanun busana Islami, yaitu dengan menonjolkan sisi kontra terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Patriarkisme sebagai Ideologi Gender Dominan dalam Pemberitaan Syariat Islam

Orientasi media yang memberitakan perempuan di dalam isu

mengenai aturan berbusana sesuai Syariat Islam tersebut menggambarkan adanya peran dari ideologi gender dominan di dalam aktifitas jurnalistik media. Perempuan akan terbebaskan jika ideologi gender dominan tersebut dapat dihapuskan dari institusi media massa. Tong menjelaskan bahwa gender adalah permasalahan dominasi dan bukanlah perbedaan, yang mana perbedaannya adalah laki-laki memiliki kekuasaan sedangkan perempuan tidak¹⁵.

Efek dari normalitas stereotip tersebut adalah memposisikan perempuan sebagai “*defiyan*”, dan ini terjadi karena dominasi maskulin yang menyerang *defiyan* tersebut. Media menjadi sarana paling diskriminatif terhadap pemberian stereotip bagi perempuan, dalam pemberitaan mengenai larangan bercelana ketat, perempuan tanpa disadari oleh mereka menjadi disubordinasikan baik dari sisi patriarki atau kapitalis karena maskulinitas dominan media.

Salah satu ideologi gender dominan di institusi media yang membuat perempuan dalam posisi tidak menguntungkan adalah patriarkisme. Patriarkisme menjadi permasalahan struktural bagi perempuan, yang mana secara umum diabaikan oleh teoretis laki-laki. Sehingga laki-laki memandang remeh terhadap penindasan yang diterima oleh perempuan di berbagai sektor sosial, khususnya di institusi media massa¹⁶. Posisi jurnalis di media dan praktisi media yang didominasi oleh laki-laki menjadikan isu-isu perempuan diliput dan

¹⁵Rosemarie Putnam Tong, *op.cit*, h.3.

¹⁶Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), h. 200-201.

ditulis dari perspektif mereka. Begitu pula dalam memberitakan permasalahan mengenai Qanun Berbusana Islami tersebut, media akan lebih cenderung menjadikan sosok perempuan sebagai objek liputan untuk diposisikan sebagai pihak lemah dan tidak beruntung.

Seperti apa yang dilakukan oleh *acehkita*, *thejakartaglobe*, dan *bbcnews*, menunjukkan bahwa perempuan di Aceh Barat seakan-akan terdiskriminasi, mendapatkan ketidakadilan, dan tidak diuntungkan oleh aturan Syariat Islam. Penekanan ketiga media terhadap isu larangan bercelana ketat yang melibatkan perempuan tersebut, terbentuk karena adanya suatu bentuk sistem patriarkat yang lebih mengedepankan laki-laki dengan tidak memposisikannya sebagai pihak yang tidak diuntungkan dalam pemberitaan media, dan menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan agar posisi laki-laki tidak terlihat lemah meskipun sama-sama terlibat di dalam hukum Syariat Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Krolokke dan Sorensen (2006), bahwa:

They are stereotyped, and the reinstatement of gender in dichotomous and hierarchic setups that may normalize discrimination and even abuse against women. (Mereka mendapatkan stereotip, dan menempatkan kembali gender dalam aturan yang dikotomi dan hierarkis akan memungkinkan untuk menaturalkan diskriminasi

dan bahkan penyalahgunaan melawan perempuan)¹⁷.

Zoonen menjelaskan bahwa ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dari institusi media muncul dari berbagai sumber, dan hambatan penting yang muncul di institusi media datang dari sikap laki-laki dan pengambil keputusan¹⁸. Institusi media membentuk suatu dikotomi dan pengaturan hierarki yang memposisikan laki-laki lebih menguntungkan daripada perempuan, selain dari bentuk patriarkisme media juga menampilkan kapitalisme. Meskipun sama-sama sebagai pelaku Syariat Islam, perempuan yang melanggar aturan Syariat Islam atau menolak aturan tersebut akan lebih menarik untuk diberitakan karena memiliki nilai jual. Ini menunjukkan betapa kapitalistiknya media-media tersebut dengan mengeksploitasi isu tentang hak-hak perempuan sebagai fokus pemberitaan.

Dalam kapitalisme, posisi perempuan diremehkan yang mana peran perempuan dianggap sebagai konsumen untuk dijadikan produk tepat dari industri kapitalis, sedangkan laki-laki penghasil upah¹⁹. Ideologi kapitalisme di media massa memposisikan keberadaan perempuan sebagai komoditas untuk menarik laba bagi kepentingan kelas dominan. Perempuan, khususnya isu-isu tentang perempuan dijadikan sebagai objek terhadap kepentingan kapital penguasa media karena dianggap menarik

¹⁷Charlotte Krolokke & Anne Scott Sorensen, *op.cit*, h. 78.

¹⁸Liesbet van Zoonen, *Feminist Media Studies* (London: Sage Publication, 1994), h. 51-52.

¹⁹Rosemarie Putnam Tong, *op.cit*, h. 157.

untuk diberitakan di media. Hal tersebut menjadikan perempuan sebagai pihak yang dieksploitasi dan dirugikan.

Ketiga media tersebut sama-sama mengkonstruksi suatu realitas, bahwa perempuan yang menolak aturan syariat yang diberlakukan oleh Bupati Aceh Barat tersebut dianggap terancam atas hak-haknya. Sehingga wacana penolakan aturan tersebut menjadi heboh dan memiliki nilai jual untuk diberitakan. Kemudian media memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadikan pemberitaan tentang isu larangan bercelana ketat bagi perempuan di Aceh Barat, sebagai komoditas atau ladang bisnis yang pasti akan dinikmati oleh khalayak ramai.

Ideologi seperti ini harus dihilangkan agar perempuan tidak mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan, dan terus-menerus dijadikan objek pemberitaan dalam pemberitaan Syariat Islam, salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan posisi perempuan dalam institusi media dan memaksimalkan pemberitaan Syariat Islam dari berbagai sudut pandang (*angle*).

Pembungkaman Perempuan yang Dilakukan Oleh Media

Dominasi sisi maskulinitas dan kekuasaan laki-laki di media menjadikan perempuan sebagai “*marked*”, sedangkan laki-laki sebagai sosok yang memiliki kekuasaan secara natural menjadi tidak dipermasalahkan posisinya, khususnya dalam penerapan aturan syariat Islam. Dalam hal ini secara tidak disadari perempuan Aceh telah mendapatkan penglabelan negatif yang berlapis oleh

media, yaitu sebagai korban dan pemicu tindakan asusila yang dilakukan laki-laki. Perempuan diberitakan dalam sudut pandang maskulin akibat dari ideologi jender dominan yang dilanggengkan di institusi media.

Dalam hal ini Krolokke dan Sorensen menjelaskan bahwa:

“Marking” is a central aspect of patriarchal linguistic classification. The feminine and female are marked, leaving the male and the masculine unmarked. “(“*Marking*” adalah aspek utama dari klasifikasi bahasa yang patriarkal. Konsep feminin dan perempuan adalah “*marked*”, meninggalkan laki-laki dan maskulin sebagai “*unmarked*”)”²⁰.

Media mengnaturalisasikan bahwa perempuan lebih layak diperjuangkan karena dianggap ditindas oleh hukum syariat, sedangkan laki-laki dianggap tidak memiliki masalah apapun dengan penerapan hukum syariat tentang berbusana secara Islami tersebut. Laki-laki tidak digambarkan sebagai pihak yang tidak patuh, pembangkang, memberontak atau merasa sebagai pihak yang tertindas atas pemberlakuan hukum syariat tersebut. Seperti dijelaskan oleh Krolokke dan Sorensen bahwa: *Language is never neutral despite pretences to the contrary* (bahasa tidak pernah netral meskipun berpura-pura untuk yang

²⁰Charlotte Krolokke & Anne Scott Sorensen, *op.cit*, h. 68.

berlawanan)²¹, dan inilah yang dikatakan sebagai suatu bentuk sistem patriarki antara laki-laki dan perempuan di mana media menjadi sarana pengekal ideologi maskulinitas melalui penggunaan bahasa yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior atau *unmarked*. Krolokke dan Sorensen menyebutkan bahwa *man-made language mutes women* (laki-laki membuat bahasa yang membisukan perempuan), dan melalui kekuasaan di media mendatangkan suatu kemampuan untuk menamakan dan menglabelkan diri mereka sebagai sesuatu yang “*unmarked*” dan melegalkan ideologi patriarkal laki-laki sebagai pihak dominan²².

Terkait dengan pemberitaan di beberapa media tersebut, lantas muncul pertanyaan mengapa media hanya menyoroti sosok perempuan sebagai isu utama terhadap penerapan aturan berbusana Islami di Aceh Barat? Kecenderungan ini justru ingin menunjukkan seakan-akan hanya perempuan sajalah yang menjadi korban dari produk hukum syariat yang dibuat oleh pemerintah setempat. Padahal, produk hukum tersebut tidak hanya mengatur tentang persoalan berbusana Islami bagi perempuan, namun juga bagi para laki-laki di Aceh Barat. Seperti yang dikatakan oleh Julia Wood (2006), bahwa posisi perempuan tidak menguntungkan:

“Women were underrepresented in the media and likely to be trivialized, victimized, or ridiculed when they were represented. Women, were

overrepresented in particular forms of media. (Perempuan ditindas di media dan sering disepelekan, menjadi korban, atau dicemooh. Perempuan, tertindas dari berbagai sisi di media)²³.

Oleh itu, media secara tidak sadar telah melanggengkan suatu kebenaran bahwa perempuan Aceh adalah “para pelanggar” syariat, bukan hanya sebagai korban yang ditindas oleh hukum syariat tersebut. Dominasi pemberitaan tentang perempuan dalam hal syariat Islam yang seakan-akan memihak perempuan, justru mengabaikan sisi lain bahwa perempuan Aceh tidak sebegitunya tertindas atau dirugikan seperti yang dikonstruksikan oleh media-media tersebut. Suara perempuan dibisukan karena kekuasaan laki-laki tidak membiarkan dan mencegah pendapat lainnya untuk didengarkan dan diketahui.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya data-data dari pihak Wilayatul Hisbah (WH) setiap tahun, yang menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang tidak mengikuti aturan tersebut. Bahwa larangan untuk memakai celana ketat bagi perempuan di Aceh Barat tidak sebegitu dijalankan. Seperti data terakhir Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2013, ada sebanyak 618 perempuan yang terjaring razia tidak menggunakan pakaian Islami. Hasil razia ini menunjukkan bahwa perempuan di Aceh tidak sebegitu merasa ditindas oleh aturan

²¹*Ibid*, h.68.

²²*Ibid*, h. 68.

²³(Julia T. Wood, *The Sage Handbook of Gender Communication* (London: Sage Publications Oaks, 2006), h.275.

yang ditetapkan, seperti penggambaran media. Seperti yang dijelaskan oleh Spender (2006), bahwa laki-laki dilihat sebagai jender yang superior karena memegang kekuasaan, sehingga maskulinitas laki-laki menjadi norma dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang baik²⁴.

Perempuan dalam hal ini menjadi sosok yang serba salah. Di satu sisi, perempuan diharuskan untuk menjadi sosok yang patuh pada syariat sebagai “patokan” berjalannya penerapan syariat Islam atau tidak, namun di sisi lain media mengkonstruksikan bahwa perempuan Aceh tersebut seakan-akan telah dirampas hak-hak mereka sebagai korban dari produk hukum syariat yang diskriminatif. Media bisa dengan mudahnya mengkonstruksikan kebenaran apa terhadap perempuan, dan perempuan selalu saja mendapatkan penglabelan atau stereotip negatif. Terhadap apa yang dikonstruksikan oleh media mengenai perempuan, diterima begitu saja oleh masyarakat patriarkial sebagai suatu hal yang natural dan wajar. Posisi jender cenderung ditampilkan dan diterima seperti mereka terlihat natural, padahal apa yang sebenarnya tampil natural pada khalayak di media, pada faktanya adalah suatu bentuk hubungan yang tidak simetris antara laki-laki dan perempuan²⁵.

KESIMPULAN

Terkait dengan aturan berbusana Islami yang diterapkan oleh Bupati terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh

Barat, terdapat perbedaan konstruksi realita yang dibangun dalam pemberitaan di tiga media online tersebut. Namun, ketiga media tersebut sama-sama cenderung menjadikan sosok perempuan sebagai fokus dari pemberitaannya dengan mengangkat tema mengenai larangan bercelana ketat bagi perempuan. Media *acehkita* sebagai media lokal di Aceh cenderung bersikap tidak terlalu frontal dalam menyudutkan pemerintah setempat atas aturan tersebut, di sisi lain media tersebut justru mempermasalahkan aturan yang melibatkan perempuan dan memposisikan perempuan Aceh sebagai pihak yang menjadi korban ketidakadilan aturan syariat. Sedangkan dua media lainnya, yaitu *thejakartaglobe* dan *bbcnews* cenderung lebih tegas dalam menunjukkan ketidaksetujuan atas peraturan Bupati Aceh Barat yang melarang perempuan bercelana ketat, ini didasarkan pada perbedaan latar belakang kedua media tersebut yang tidak terlalu mengetahui situasi dan kondisi langsung di wilayah tersebut. Kedua media tersebut juga menglabelkan sosok perempuan Aceh sebagai “korban” ketidakadilan aturan syariat yang dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Konstruksi pemberitaan di tiga media online mengenai aturan berbusana muslim di Kabupaten Aceh Barat tersebut, dengan mengangkat fokus permasalahan pada larangan bercelana ketat terhadap perempuan, justru menambahkan stereotip terhadap perempuan Aceh sebagai pihak yang tersudutkan. Konstruksi pemberitaan di media menjadikan Aceh dilabelkan sebagai wilayah yang ketat atau “strict” terhadap perempuan dalam hal syariat

²⁴Charlotte Krollokke & Anne Scott Sorensen, *op.cit*, h. 68.

²⁵Charlotte Krollokke & Anne Scott Sorensen, *op.cit*, h.78.

Islam. Dengan mengabaikan pemberitaan mengenai laki-laki, ini menunjukkan bahwa sistem patriarkal dengan adanya dominasi maskulinitas di media yang menganggap bahwa aturan syariat Islam tersebut tidak memperlakukan posisi laki-laki dan justru melemahkan posisi perempuan. Permasalahan perempuan dan syariat Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik di media massa, karena oleh pihak kapitalis berita mengenai perempuan dapat memberikan keuntungan karena lebih menarik perhatian banyak kalangan.

Perempuan dalam pemberitaan di ketiga media tersebut dibisukan oleh bahasa laki-laki, sebagai sosok yang dianggap mendapat perlakuan tidak adil atas peraturan Syariat Islam juga sosok yang menjadi patokan penegakan Syariat Islam. Pembisuan terhadap perempuan tersebut dilakukan oleh media melalui *angle* pemberitaan yang cenderung menyoroti permasalahan perempuan yang menolak aturan larangan bercelana ketat. Sedangkan posisi laki-laki dianggap tidak bermasalah dalam aturan Syariat Islam tersebut, karena posisi mereka yang lebih superior.

Daftar Pustaka

- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Penj: Nurhadi.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Krolokke, Charlotte dan Sorensen, Anne Scott. (2006). *Jender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance*. California: Sage Publications.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Riant. 2008. *Jender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- West, Richard dan Lynn H, Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Salemba Humanika.
- Wood, Julia. T. 2006. *The Sage Handbook of Jender Communication*. London: Sage Publications Oaks.
- Zoonen, Liesbet van. 1994. *Feminist Media Studies*. London: Sage Publication.
- Jurnal:**
- Nugrahajati, Susilastuti Dwi. 2012. *Potrait of Woman on Mass Media*. Jurnal. Yogyakarta: Buku Litera.
- Suharso, Pudjo. 2006. *Pro Kontra Implementasi Perda Syariah*. Jurnal. Al-Mawarid. Edisi XVI.
- Wulandari, Dyah. 2012. *Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Jender*. Jurnal Interaksi. Universitas Diponegoro. Vol.1. No.1.